



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2022**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA/NAGARI (DPMD/N)  
TAHUN 2023**

**Sarilamak, Agustus 2022**



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

## **Pasal 2**

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2023.

## **Pasal 3**

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2023.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

## **Pasal 4**

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

- ( 2 ) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

- ( 1 ) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 dan Renstra PD.
- ( 2 ) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- ( 3 ) PD menyusun RKA Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja PD.

##### **Pasal 6**

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2023.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

### **BAB V**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 8**

- ( 1 ) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- ( 2 ) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 4 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 NOMOR 40

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA



**ERI FORTUNA, SH**  
**NIP.19660104199303 1 006**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renja DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renja merupakan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun.

Dokumen Renja DPMD/N Tahun 2023 disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2023 juga berpedoman pada Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025, serta telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun diharapkan dapat mencapai Tujuan, Sasaran Kinerja DPMD/N Tahun 2023 dan selaras, berkesinambungan serta sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini terdapat dukungan dari berbagai pihak. Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Penyajian Renja ini masih belum sempurna, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan dokumen Renja di masa mendatang. Demikianlah Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh,     Agustus 2022

**KEPALA DPMD/N  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**ENDRA AMZAR, SH**  
NIP. 19680906 199603 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	<i>i</i>
DAFTAR ISI .....	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL .....	<i>iii</i>
DAFTAR GAMBAR .....	<i>iv</i>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1.    Latar Belakang .....	I-1
1.2.    Landasan Hukum .....	I-5
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	I-7
1.4.    Sistematika Penulisan .....	I-8
<b>BAB II     HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD/N</b>	<b>II-1</b>
<b>TAHUN LALU .....</b>	
2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N .....	II-1
2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .....	II-34
2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N .....	II-38
2.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-40
2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-52
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota .....	III-1
3.2.    Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD/N .....	III-4
3.3.    Program Dan Kegiatan .....	III-6
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
<b>PERATURAN BUPATI NOMOR 391 TAHUN 2021</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 .....	II-36
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala DPMDN Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026 .....	II-37
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota .....	II-42
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 .....	II-52
Tabel 3.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	III-7
Tabel 3.2	Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-8
Tabel 3.3	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMD/N Tahun 2023 .....	III-9
Tabel 3.4	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-10
Tabel 3.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	III-12
Tabel 4.1.	Rencana Indikator Kinerja Kepala Daerah Tahun 2023 .....	IV-1
Tabel 4.2.	Rencana Target Kinerja IKU DPMD/N Tahun 2023.. .....	IV-2
Tabel 4.3.	Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 ..	IV-2
Tabel 4.4.	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 .....	IV-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Forum Perangkat Daerah DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota ...	I-3
----------	---	-----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut:

#### **(i) Persiapan Penyusunan**

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan November 2021.

(ii) Penyusunan Rancangan Awal

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2023, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2021. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

(iii) Penyusunan Rancangan

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2023 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2022.

(iv) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 16 Februari 2022. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi DPMD/N. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target

kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Dokumentasi kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.

**Gambar 1.**  
**Forum Perangkat Daerah DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022**



(v) **Perumusan Rancangan Akhir**

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

(vi) **Penetapan.**

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2023 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N,

rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Seperti halnya RKPD 2023, maka Renja DPMD/N Tahun 2023 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-2 dan menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari periode tahun 2021-2026. Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Renstra DPMDN Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja ini juga memperhatikan Renja DPMD Provinsi Sumatera Barat. Renja DPMD Provinsi Sumatera Barat merupakan penjabaran dari Renstra DPMD Provinsi Sumbar. Kemudian Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota sebagai penjabaran Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota. Penyusunan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota memperhatikan Renstra DPMD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga secara otomatis perumusan tujuan, sasaran, indikator, program dan kegiatan Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah memperhatikan Renja DPMD Provinsi Sumbar. Sehingga pelaksanaan program kegiatan di Provinsi yang terkait dengan Kab. Lima Puluh Kota dapat terlaksana.

Selanjutnya Renja DPMD/N ini akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD. Dengan demikian tahapan perencanaan akan berlanjut kepada tahap penganggaran. Kemampuan keuangan daerah akan memilah program kegiatan unggulan yang mendukung pencapaian target kinerja serta penganggarnya. Kemudian Renja Perangkat Daerah akan menjadi bahan dalam evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.

21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2023.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2023.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2023.

4. Menjadi pedoman dalam evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan (program dan kegiatan) Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

##### **I. Pendahuluan.**

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2023, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

##### **II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.**

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021-2022 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2022, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.**

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

##### **IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.**

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja serta Pendanaan yang dibutuhkan.

##### **V. Penutup.**

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N**

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2021 dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Perkiraan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2022 dapat disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 (Tabel T.C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan**  
**Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	78.84	100%	100%	26%
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%		80%	80%	100	85%	85%	35%
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	44%
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	33%
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKJIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	29 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	9 Dokumen	31%
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	24 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.00	4 Laporan	8 Laporan	33%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	81.09	100%		28%
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	143 ASN		27 ASN	27 ASN	100.00	27 ASN	54 ASN	38%
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	60 Bulan		-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	20%
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	15000 Dokumen		-	-	0.00	3000 Dokumen	3000 Dokumen	20%
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	60 Bulan		-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	20%
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen	2 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	26 Dokumen		-	-	0.00	4 Dokumen	4 Dokumen	67%
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60 Dokumen		-	-	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	20%
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	17%
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen		-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%		100%	100%	12.30	100%		22%
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen		-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	11%
2.13.01.2.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	5 Dokumen		-	-	0.00	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
2.13.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	13 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100.00	2 Laporan	5 Laporan	38%
2.13.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	60 Bulan		-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	20%
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		0%	0%	0.00	100%		19%
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	5 Unit		-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	20%
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	373 Stel		-	-	0.00	48 Stel	48 Stel	13%
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	245 Dokumen		-	-	0.00	47 Dokumen	47 Dokumen	19%
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	60 Bulan		-	-	0.00	12 Bulan	12 Bulan	20%
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP ASN	144 Dokumen		-	-	0.00	28 Dokumen	28 Dokumen	19%
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	10 ASN		-	-	0.00	2 ASN	2 ASN	20%
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 ASN		-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	20%
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN		-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	20%
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN		-	-	0.00	5 ASN	5 ASN	20%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	100%	52.27	100%		28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	36 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100.00	6 Jenis	12 Jenis	33%
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100.00	5 Jenis	10 Jenis	33%
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	18 Paket		-	-	0.00	3 Paket	3 paket	17%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	36 Paket		6 Paket	6 Paket	100.00	6 Paket	12 Paket	33%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	48 Jenis		8 Jenis	8 Jenis	100.00	8 Jenis	16 Jenis	33%
		Jumlah penggandaan yang disediakan	17990 Lembar		2990 Lembar	2990 Lembar		2990 Lembar	6000 Lembar	33%
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1080 Eksemplar		-	-	0.00	180 Eksemplar	180 Eksemplar	17%
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	72 Bulan		-	-	0.00	-	-	-
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	5650 Orang		600 Orang	600 Orang	100.00	600 Orang	1200 Orang	20%
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	900 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	100.00	150 Laporan	300 Laporan	33%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	1800 Porsi		300 Porsi	300 Porsi		300 Porsi	600 Porsi	33%
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	6 Laporan		-	-	0.00	1 Laporan	1 Laporan	17%
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>		<b>21%</b>
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	6 Unit		-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	17%
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	14 Unit		-	-	0.00	4 Unit	4 Unit	29%
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah filling kabinet yang diadakan	93 Unit		-	-	0.00	2 Unit	2 Unit	18%
		Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan			-	-	0.00	1 Set	1 Set	
		Jumlah lemari arsip yang diadakan			-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	
		Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan			-	-	0.00	13 Unit	13 Unit	
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	57 Unit		-	-	0.00	14 Unit	14 Unit	25%
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit		-	-	0.00	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	5 Unit		-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	20%
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan	5 Paket		-	-	0.00	1 Paket	1 Paket	20%
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80.70</b>	<b>100%</b>		<b>33%</b>
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	24 jenis		12 Bulan	12 Bulan	100.00	4 jenis	4 Jenis	17%
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	72 Rekening		12 Rekening	11 Rekening	100.00	12 Rekening	24 Rekening	33%
		Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	2160 Meter Kubik		360 Meter Kubik	360 Meter Kubik		360 Meter Kubik	720 Meter Kubik	33%
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	72000 KWh		12000 KWh	12000 KWh		12000 KWh	24000 KWh	33%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	155 Unit		31 Unit	31 Unit	100.00	31 Unit	62 Unit	40%
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	105 Orang		21 Orang	21 Orang	100.00	21 Orang	42 Orang	40%
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>66.94</b>	<b>100%</b>		<b>22%</b>
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	114 Unit		19 Unit	19 Unit	100.00	19 Unit	19 Unit	17%
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	84 Unit		14 Unit	14 Unit	100.00	14 Unit	14 Unit	17%
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	30 Unit		5 Unit	5 Unit	100.00	5 Unit	5 Unit	17%
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit		75 kgt	75 kgt	-	-	-	-
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	625 Paket		-	-	0.00	125 Paket	125 Paket	20%
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	30 Paket		10 Paket	10 Paket	100.00	6 Paket	16 Paket	53%
		Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	115 Unit		-	-	0.00	23 Unit	23 Unit	20%
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit		-	-	0.00	1 Unit	1 Unit	17%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51 Paket		-	-	0.00	10 Paket	10 Paket	20%
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	60 Paket		1 Paket	1 Paket	100.00	10 Paket	10 Paket	17%
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>56.80</b>			
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa</b>	<b>12,5%</b>		<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>62.63</b>	<b>2,5%</b>	<b>5%</b>	<b>40%</b>
<b>2.13.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>12,5%</b>		<b>2.5%</b>	<b>2.5%</b>	<b>62.63</b>	<b>2,5%</b>	<b>5%</b>	<b>40%</b>
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12,5%		2,5%	2,5%	100.00	2,5%	5%	40%
<b>2.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa</b>	<b>100%</b>		<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>49.77</b>	<b>54,43%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>
<b>2.13.03.2.01</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan</b>	<b>158 Nagari</b>		<b>2 Nagari</b>	<b>2 Nagari</b>	<b>49.77</b>	<b>43 Nagari</b>	<b>2 Nagari</b>	<b>3%</b>
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	79 Nagari		2 Nagari	2 Nagari	100.00	36 Nagari	2 Nagari	3%
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	79 Nagari		0	0	0.00	7 Nagari	-	0%
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan		0 Kawasan Perdesaan	0 Kawasan Perdesaan	98.93	1 Kawasan Perdesaan	-	0%
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>51.85</b>	<b>100%</b>	<b>58%</b>	<b>85%</b>
<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>68%</b>		<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>51.85</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>	<b>85%</b>
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari		0	0	0.00	79 Wali Nagari	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	796 Aparatur		0	0	0.00	79 Wali Nagari+ 79 Bamus Nagari	-	-
		Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	95%		-	-	0.00	49%	-	-
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPP Tepat waktu	100%		75%	75%	85.27	80%	80%	80.0%
		Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	100%		75%	75%		80%	80%	80.0%
		Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	100%		85%	85%		86%	86%	86.0%
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase aparatur pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDS	100%		85%	85%	100.00	86%	86%	86.0%
		Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	100%		80%	80%		86%	86%	86.0%
		Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	100%		75%	75%		80%	80%	80.0%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 nagari		79 Nagari	79 Nagari	100.00	79 Nagari	79 Nagari	40%
		Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari		13 Nagari	13 Nagari		13 Nagari	13 Nagari	40%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagari dan 13 Kec		79 Nagari dan 13 Kec	79 Nagari dan 13 Kec	100.00	79 Nagari dan 13 Kec	79 Nagari dan 13 Kec	20%
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	1422 Dokumen		237 rancangan/ dokumen	237 rancangan/ dokumen	100.00	237 rancangan/ dokumen	237 rancangan/ dokumen	20%
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%		70%	70%	92.12	82%	82%	86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	12 BumDesa		0	0		4 BumDesa	-	-
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali Nagari Serentak	79 Nagari		18 Nagari	18 Nagari	99.65	52 Nagari	70	89%
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari		-	-	0.00	79 Nagari	79 Nagari	100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitoring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	79 Nagari		26 Nagari	26 Nagari	100.00	39 Nagari	65	82%
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	79 Nagari		40 Nagari	40 Nagari		45 Nagari	45 Nagari	57%
		Jumlah nagari dengan status swadaya	0		3 Nagari	3 Nagari		2 Nagari	2 Nagari	0%
		Jumlah nagari dengan status swasembada	31 Nagari		27 Nagari	27 Nagari		28 Nagari	28 Nagari	90%
		Persentase nagari dengan status mandiri	14%		5%	5%		5%	5%	36%
		Persentase nagari dengan status tertinggal	0%		2.5%	2.5%		2.5%	2.5%	0%
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	1250 orang		0	0	0.00	250 orang	-	-
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	100%		85%	85%	93.25	85%	85%	85%
2.13.04.2.01.14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	719 orang		0	0	0.00	79 orang	158 orang	22%
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	79 nagari		2 nagari	2 nagari	100.00	2 nagari	4 nagari	5%
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	100%		25%	25%	100.00	50%	50%	50%
		Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja	100%		60%	60%	0.00	70%	70%	70%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku								
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	54		44	44	100.00	46	44	81%
		Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	33		35	35		34	35	106%
		Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3		3	3		3	3	100%
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	48 Kegiatan		5	5		7 Kegiatan	5	10%
		Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	18 Inovasi		3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi	3 Inovasi	17%
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	75%		50%	50%	59.94	55%	55%	73%
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75%		50%	50%	59.94	55%	55%	73%
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	100.00	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	2 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	33%
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	100.00	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	158 Kader	22%
		Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat	33%
		Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kabupaten	11 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 6 tahun		1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		2 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	3 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	27%
		Persentase Posyandu Aktif Mandiri	20 % Posyandu aktif mandiri		12 % Posyandu aktif mandiri	12 % Posyandu aktif mandiri		13 % Posyandu aktif mandiri	13 % Posyandu aktif mandiri	33%
		Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Fasilitasi KKN 15 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi	33%
		Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	33%
		Jumlah Pokja Posyandu Aktif	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari	5 Pokja Poyandu di Nagari	33%
		Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penggunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi (Perbud )		1 Regulasi (Perbud )	1 Regulasi (Perbud )		1 Regulasi (Perbud )	1 Regulasi (Perbud )	33%
			Hibah LKAAM (6 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359 KPMD		20 KPMD	20 KPMD	100.00	40 KPMD	60 KPMD	17%
		Persentase LPM Aktif	80%		58%	58%		60%	60%	75%
		Jumlah kelompok BP- SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	141 KP SPAM		20 KSPAMS	20 KSPAMS		60 KPSPAM	80 KP SPAM	57%
		Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kali Rakor		1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		2 Kali Rakor	3 Kali Rakor	27%
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	40 Kelompok		0	0	0.00	26 Kelompok	-	-
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	79 Posyantek		2 Posyantek	2 Posyantek	100.00	6 Posyantek	6 Posyantek	8%
		Jumlah Gelar TTG yang diikuti	18 Gelar TTG		3 Gelar TTG	3 Gelar TTG		3 Gelar TTG	3 Gelar TTG	17%
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	79 Nagari		79 Nagari	79 Nagari	91.93	79 Nagari	79 Nagari	33%
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	6 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		1 Nagari	1 Nagari	33%
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	3 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2022	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	93 Kelompok		93 Kelompok	93 Kelompok	100.00	93 Kelompok		33%

**Tabel 2.2 (Tabel T.C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan**  
**Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
X	Xx	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	50%	24%	24%	100	-	74%	74.00%
X	Xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen dan surat	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran rekening telepon ,listrik ,air dan internet	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
X	Xx	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kelengkapan komputer yang diadakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	48 bulan	80%
X	Xx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah OB yang dibayar honoranya dan jumlah hari kerja THL yang dibayarkan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rata-rata servis peralatan kantor	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang diadakan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak,Jumlah Lembar penggandaan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	Xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	xx	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	48 bulan	80%
X	xx	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	48 bulan	80%
x	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang disediakan	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%
X	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	-	60 bulan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
X	xx	2		<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
X	xx	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan Roda 4 yang diadakan	9 unit kend roda 2 & 2 unit kend roda 4	2 unit kend roda 2	-	-	-	-	2 unit kend roda 2	22%
X	xx	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Paket Pertengkapan Gedung Kantor yang diadakan	32 paket	-	-	-	-	-	-	0
X	xx	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Laptop ,UPS,Fotocopy mini ,layar dan meja dan kursi rapat yang diadakan	26 paket	6 paket	-	-	100	-	6 paket	23%
X	xx	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	14 paket	2 paket	-	-	100	-	2 paket	14%
X	xx	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan gedung kantor	3 paket	-	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	33%
X	xx	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kali servis kendaraan roda 4 dan roda 2	263 kgt	96 kgt	60 Kgt	60 Kgt	100	-	156 kgt	59%
X	xx	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pekerjaan Pemeliharaan Perlengkapan Rutin/berkala Gedung Kantor	50 kgt	-	-	-	-	-	10 kgt	20%
X	xx	2		Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan mebeleur	2 paket	-	-	-	-	-	-	0%
				Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor	Jumlah Pekerjaan rehab berat/sedang gedung kantor	3 paket	-	-	-	-	-	-	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
X	xx	3		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat disiplin aparatur</b>					-			
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	0%
X	xx	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	41 stel	-	-	-	-	-	40 stel	98%
			4	Pengadaaan Pakaian Kopri	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan	35 stel	-	-	-	-	-	-	0%
X	xx	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan	106 stel	-	-	-	-	-	-	0%
X	xx	5		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Jumlah Pakaian khusus untuk hari-hari tertentu yang diadakan</b>								
X	xx	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	12 orang	-	-	-	-	-	3 orang	25%
			0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	32 orang	-	-	-	-	-	-	0%
			0	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	46 orang	-	-	-	-	-	-	0%
X	xx	6		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat perkembangan sistem pelaporan</b>								
X	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP ,SPIP,LKPJ,SPBE, Penetapan kinerja Bapelitbang ,Laporan bulanan ,laporan adm	55 dokumen	30 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	-	37 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	5 dokumen	100%
		6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	5 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	-	5 dokumen	100%
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1				URUSAN WAJIB									
		15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan								
x	xx	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kader posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Anaka Sekolah(PMTAS) dan Fasilitasi KKN	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu	549 posyandu	100	-	549 posyandu	100%
X	xx	15	2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	1 kgt	2 kgt	1 kgt	1 kgt	100	-	3 kgt	100%
X	xx	15	3	Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah Posyantek yang terbentuk	37 posyantek	5 posyantek	8 posyantek	8 posyantek	-	-	13 posyantek	35%
				Pemberdayaan Tekonologi Tepat Guna	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	3 kgt	3 kgt	3 kgt	3 kgt	100	-	6 kgt	100%
X	xx	15	5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.	79 LPM	60 LPM	79 LPM	79 LPM	100	-	79 LPM	100%
				Pembinaan PKK	Jumlah Pembinaan Kelompok PKK se-Kab. Lima Puluh Kota	93 klpk	93 klpk	93 klpk	93 klpk	100	-	93 klpk	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
				Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran Pengembangan dan Penghapusan Batas Nagari	Persentase nagari yang terfasilitasi untuk pemekaran nagari	133%	20%	20%	20%	100	-	40%	40%
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembentukan Pemekaran pengembangan Nagari	Persentase Nagari yang termonitoring dan terevaluasi dalam rangka pemekaran dan penetapan batas nagari	127%	43%	-	-	28.90	-	43%	43%
X	xx	15	15	Temu Wicara Lembaga Adat se-Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah pembinaan lembaga adat dan bertambahnya wawasan anggota lembaga adat se-kab. Lima Puluh Kota (Lembaga Adat Aktif)	5 kgt	1 kgt	-	-	-	-	1 kgt	20%
X	xx	15	16	Pemberdayaan Usaha Masyarakat dalam Peningkatan Peran Perempuan	-	93 klp	-	-	-	-	-	-	-
		16		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan									
X	xx	16	2	Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah Pelatihan Ketrampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	95%	80%	90%	90%	100	-	90%	95%
X	xx	16	5	Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Pedesaan	Jumlah Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Kecil Menengah di Pedesaan	62 klpk	62 klpk	-	-	-	-	62 klp	100%
X	xx	16	6	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (Gelar TTG Nasional).	15 kgt	6 kgt	3 kgt	3 kgt	-	-	9 kgt	60%
X	xx	16	7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Rakor P3MDyang dilaksanakan dan terlaksananya monev kegiatan P3MD di Nagari	6 kgt	4 kgt	2 kgt	2 kgt	100	-	6 kgt	100%
					Jumlah Lembaga Ekonomi yang dimonitoring	115 klpk	-			100	-		



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
x	xx	16	15	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Perlombaan Desa dan Kelurahan	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	-	79 nagari	100%
		17		<b>Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa</b>									
x	Xx	17	1	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan kelompok Masyarakat Membangun Desa	80 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	-	79 nagari	100%
					Jumlah Nagari yang akan melaksanakan TMMN dan BBGRM						-		
x	Xx	17	2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase nagari yang Menetapkan RKP Tepat Waktu	100%	-	75%	75%	100	-	-	-
x	Xx	17	3	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa	100%	-	-	-	-	-	-	-
x	Xx	17	4	Monitoring dan Evaluasi	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	-	-	100	-	100%	100%
x	Xx	17	5	Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari	Persentase nagari dengan status berkembang dan maju	100%	100%	-	-	100	-	100%	100%
					Persentase nagari dengan status swakarya dan swasembada						-		
x	Xx	17	6	Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM)	Jumlah pembinaan serta penilaian kepada BP-SPAMS dan movev kelembagaan KPP-FASUM	114 klp	209 klp	157 klp	157 klp	100	-	366 klp	100%
		18		<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
X	Xx	18	1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah peserta Bimtek pengelola kawasan pedesaan	120 orang	-	30 orang	30 orang	-	-	30 orang	25%
X	Xx	18	2	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari	723 orang	158	184 orang	184 orang	100	-	184 orang	25%
X	Xx	18	3	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	100%	474	-	-	100	-	474 orang	100%
X	Xx	18	4	Rapat koordinasi dan rapat kerja wali nagari	Persentase tingkat kehadiran Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%
X	Xx	18	9	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Bamus Nagari yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka penataan kelembagaan Bamus Nagari dan terlaksananya Pilwanag	100%	44%	33%	33%	100	-	77%	77.00%
		20		<b>Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>									
X	Xx	20	1	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APB Nagari tepat waktu di Kecamatan	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	-	79 nagari	100%
X	Xx	20	3	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	78 buah	14 buah	7 buah	7 buah	100	-	21 buah	27%
X	Xx	20	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan peraturan Nagari tentang LKPJ Nagari tepat waktu	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	-	79 nagari	100%
X	Xx	20	5	Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan Nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	79 nagari	79 nagari	79 nagari	79 nagari	100	-	79 nagari	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		24		Program Penataan Peraturan Perundangan									
		24	1	Fasilitasi penyusunan produk hukum nagari skala kabupaten dan nagari	Persentase peningkatan jumlah produk hukum yang dilahirkan oleh nagari (wajib dan di luar yang wajib)	100%	45%	-	-	100%	-	100%	45.00%

### **2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Bencana nasional *Covid-19* masih berlanjut pada Tahun 2021, sehingga berdampak pada kebijakan anggaran. Kebijakan refocussing, pergeseran dan perubahan anggaran memangkas anggaran DPMD/N dari Rp. 5.730.186.285,- menjadi Rp. 4.607.620.450,-. Kemudian pada perubahan anggaran menjadi Rp. 4.538.751.558,-. Dampak dari kebijakan ini adalah terdapat beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan, program/kegiatan/subkegiatan terlaksana namun belum mencapai target yang ditetapkan di awal rencana. Kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target perencanaan tersebut antara lain:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Subkegiatan di bawah ini merupakan subkegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2021, karena tidak dianggarkan lagi pada refocussing anggaran.

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 13.000.000,-.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 370.875.000,-.
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 14.000.000,-.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 45.000.000,-.

#### **B. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, subkegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 12.320.100,- berkurang menjadi Rp. 475.100,-. Subkegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 470.000,- (98,93%) serta realisasi fisik kegiatan

mencapai 100,00%. Tidak ada keluaran dari sub kegiatan ini, karena dana untuk sub Kegiatan di Refocussing dan Belanja yang tersedia hanya untuk belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan tidak tercapai kinerja yang direncanakan di awal perencanaan yaitu Sosialisasi Pembentukan Kawasan Perdesaan belum terlaksana.

### **2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Pada Tahun 2021, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.448.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.321.000,- (99,38%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerja adalah Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Renstra Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021.
  - b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.932.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.287.000,- (97,06%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA Tahun Anggaran 2022.
  - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.068.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.873.000,- (97,24%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah tersedianya Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2021.

- d) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.033.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.339.000,- (82,79%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya DPA- SKPD Tahun Anggaran 2021.
- e) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.320.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.309.000,- (99,75%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %. Capaian kinerjanya adalah tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya DDPA- SKPD Tahun Anggaran 2021.
- f) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.605.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.306.500,- (99,16%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya LKjIP, LKPJ, SPIP dan Dokumen PK.
- g) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.805.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.663.000,- (98,69%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian Kinerja yaitu Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja Satuan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.592.168.258,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.525.193.473,- (97,42%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

- b) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.986.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.964.000,- (99,72%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. capaian kinerja yaitu tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
  - c) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.718.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.623.000,- (97,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya yaitu terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Bulanan/Triwulan dan Semesteran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- a) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.957.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.707.000,- (54,60%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya yaitu terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- a) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.081.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.078.000,- (99,86%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Bola lampu, Baterai dan Terminal Kontak.
  - b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.600.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat

Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Eksternal Hard disk, Calculator dan Tisu gantung.

- c) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.801.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.549.200,- (84,37%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Kegiatan Kantor lainnya.
- d) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.671.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.117.700,- (48,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Barang Cetak dan Penggandaan.
- e) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.295.000,- (48,41%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Makan dan Minum Tamu.
- f) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.495.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.279.200,- (94,24%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Capaian kinerjanya adalah terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Makan Minum rapat dan Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

#### 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.170.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.163.000,- (99,40%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Materai dan 1 Buah Buku Cek, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- b) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.404.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.407.051,- (58,54%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, yaitu listrik 12 bulan, telepon 12 bulan dan internet 12 bulan, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - c) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.140.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.250.000,- (69,22%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ( Service Komputer dan AC), dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - d) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.121.830.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.830.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Jasa Pelayanan Kantor Yaitu Honorarium Pengurus Barang 12 Bulan, Tenaga Administrasi 12 Bulan, Tenaga Operator Komputer 12 Bulan, Tenaga Pelayanan umum (Petugas K3) Serta Tenaga Sopir, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.665.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 181.143.873,- (95,51%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jasa service, penggantian suku cadang dan bbm serta pelumas kendaraan dinas roda empat dan roda dua dengan capaian kinerja tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

- b) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 954.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 603.000,- (63,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jasa pencucian alat rumah tangga (laundry karpet, alat meja, bendera dan gorden) dengan capaian kinerja tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah.
- c) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.334.045,- (93,19%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Rehab Bangunan Kantor ( WC), dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

## **B. Program Penataan Desa**

### **1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.**

- a) Subkegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.639.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.634.200,- (99,98%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah sosialisasi tentang pemekaran nagari kepada Wali Nagari dan *stakeholders* se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan pembinaan fasilitasi kepada nagari-nagari yang merencanakan pemekaran nagari serta nagari persiapan menuju nagari definitif, dengan capaian kinerja tersosialisasinya Pemekaran Nagari di 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dan terfasilitasinya 2 Nagari yang sedang berproses pemekaran Nagari.

## **C. Program Peningkatan Kerjasama Desa**

### **1. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa**

- a) Subkegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.870.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.775.000,- (96,69%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah identifikasi kerjasama antar nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja terfasilitasinya kerjasama antar nagari.

#### **D. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
  - a) Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.596.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.838.500,- (96,33%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rakor Wali Nagari dan Peningkatan Kapasitas BAMUS tahun 2021, dengan capaian kinerja Meningkatnya Pemahaman Wali Nagari dan Bamus terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota
  - b) Subkegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.205.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.200.000,- (99,93%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Evaluasi Produk Hukum Nagari pada 79 Nagari dengan capaian kinerja terfasilitasinya Nagari dalam penyusunan produk hukum Nagari.
  - c) Subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.435.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.430.000,- (99,65%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,65 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, dengan capaian kinerja Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Sungai Antuan Kecamatan Mungka.
  - d) Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.220.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.220.000,- (100,0%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya workshop Penyusunan Profil Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan capaian kinerja terlaksananya Pemutakhiran Profil Nagari.
  - e) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.236.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.848.000,-

(93,25%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 93,25%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistim Pengelolaan Asset Desa (SIPADES) yang diikuti oleh perangkat Nagari yang mengelola Aset Desa/Nagari dengan Indikator kinerja yaitu:

- 1) Jumlah Nagari yang menyampaikan Laporan Aset Nagari tepat waktu dengan target yaitu 63 Nagari.
  - 2) Jumlah nagari yang menerapkan Aplikasi SIPADES sesuai aturan dengan target kinerja yaitu 63 Nagari.
  - 3) Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aset nagari dalam 1 tahun yaitu 60 kali kegiatan dengan capaian kinerja yaitu meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari dalam penggunaan Aplikasi SIPADES dan tepat waktunya penyusunan dokumen administrasi Aset nagari yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Subkegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.062.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.017.500,- (99,89%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dan FGD penetapan dan Penegasan Batas Nagari, dengan capaian kinerja terselesaikannya Peta Batas Nagari Nagari Maek dan Pangkalan serta Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Nagari Maek dan Pangkalan.

#### **E. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - a) Subkegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.802.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.777.900,- (99,63%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini Lembaga Adat di Nagari yang

mendapatkan pembinaan dalam rangka Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah 8 Nagari.

- b) Subkegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.167.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.238.800,- (97,99%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah:
  - i. Terlaksananya Lomba Inovasi Tk. Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - ii. Terlaksananya Lomba Inovasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat secara Daring.
  - iii. Sosialisasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) ke Nagari.
- c) Subkegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.207.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.50.760,000,- (91,94%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 91,93%. Keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota dan TMMN ke-111 yang dilaksanakan di Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka dengan capaian kinerja Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari.

### **2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.**

Program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### **A. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

- 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
  - a) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.370.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.655.000,- (85,27%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 85,27%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya Nagari dalam penyusunan APB Nagari yang ditargetkan yaitu 63 Nagari yang

menyampaikan APB tepat waktu, terealisasi yaitu sebanyak 74 Nagari dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian kinerja meningkatnya pemahaman desa/nagari dalam menyusun perencanaan pendapatan, anggaran dan belanja desa/nagari.

- b) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.052.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.702.000,- (97,35%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- i. Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa,
- ii. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LKPJ) tepat waktu, yang ditargetkan untuk 63 Nagari dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai yaitu 74 nagari.

Capaian kinerja sub kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.3.

- c) Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.005.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.847.400,- (99,49%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya/terikutinya penyelenggaraan Musrenbang di Nagari dengan indikator kinerja yaitu:

- i. Jumlah Nagari yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu.
- ii. Jumlah Nagari menetapkan RKP tepat waktu.

- d) Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.272.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.492.400,- (92,12%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 92,12%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Permendes No. 15 Tahun 2021 dengan capaian kinerja meningkatnya pemahaman pengurus tentang Bumdes.

- e) Subkegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.720.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.710.000,- (99,96%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah : terfasilitasinya Nagari dalam menyampaikan LKPJ tepat waktu dengan Target yaitu 63 Nagari, dan

Jumlah nagari yang menyampaikan Laporan BLT, PPMK Mikro, Penyerapan DD Tepat Waktu dengan target yaitu 63 Nagari dengan capaian kinerja tepat waktunya penyusunan dokumen LKPI Wali Nagari yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f) Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.77.369.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 77.364.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi Tingkat Perkembangan Nagari se Kabupaten Lima Puluh kota dan terlaksananya Lomba Nagari di Tingkat Kabupaten, dengan capaian kinerja tersusunnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa di Kabupaten Lima Puluh Kota dan terpilihnya 3 Nagari Berprestasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

## **B. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - a) Subkegiatan Fasilitasi Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.501.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.455.000,- (98,76%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah KPM mengikuti pelatihan/Workshop /Bimbingan teknis, pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM dan pengurus RDS sebanyak 5 Nagari, Pelatihan kader posyandu di 5 Nagari, Fasilitasi Perguruan Tinggi yang akan mengadakan KKN ke Nagari, Lomba Kader Posyandu tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Fasilitasi Kader Posyandu dalam mengadakan Lomba tingkat Sumatera Barat di Padang. Mengadakan Fasilitasi terhadap LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menerima dana Hibah untuk operasional kegiatan.

- b) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.765.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.887.500,- (98,37%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100 %. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah, Bimbingan Teknis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Bimbingan Teknis Kelompok Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS), Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan terlaksananya Monitoring Kelembagaan yang ada di Nagari dengan capaian kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 79 LPM, 167 KP-SPAM, dan terlaksananya Rakor P3MD.
- c) Subkegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.121.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 412.375.600,- (97%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah kelompok PKK yang dibina dalam 93 kelompok dengan rincian : 1 kelompok TP-PKK Kabupaten, 13 kelompok TP-PKK Kecamatan, 79 kelompok TP-PKK Nagari .

#### **2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan**

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan/fisik kegiatan mencapai **99,59%**. Tetapi ada beberapa subkegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah karena adanya kebijakan *refocussing* anggaran terkait bencana nasional **Covid-19**. Subkegiatan yang tidak terlaksana yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan.



3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Mebel.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, subkegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya.
5. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa, subkegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, subkegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

#### **2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu, terhadap pencapaian target dan realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 96.07%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian target kinerja dibandingkan dengan target Renstra 2026 adalah sebesar 26%.**
2. **Program Penataan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,98%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian target kinerja dibandingkan dengan target Renstra 2026 adalah sebesar 2.5%.**
3. **Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97.01%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian target kinerja dibandingkan dengan target Renstra 2026 adalah sebesar 1%.**
4. **Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 96,02%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 97,26%. Tingkat capaian target kinerja dibandingkan dengan target Renstra 2026 adalah sebesar 85%.**
5. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 97,20%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 99,40%. Tingkat capaian target kinerja dengan target Renstra 2026 adalah sebesar 73%.**

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2021-2022 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan terhadap target Renstra rendah. Namun pencapaian Kebijakan refocussing anggaran pada tahun 2021, mempengaruhi tingkat capaian kinerja program/kegiatan.

#### **2.1.6 Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja**

Beberapa kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Dengan adanya perubahan Renja DPMD/N tahun 2021, target kinerja direvisi sebagai upaya untuk menghadapi kendala keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan. Sehingga pencapaian target lebih sesuai dengan pagu anggarannya.
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak terlaksana pada Tahun 2021, diusulkan kembali pada Tahun 2023.
3. Koordinasi intensif dengan Bapelitbang sehingga diharapkan usulan program/kegiatan dan pagu anggaran urusan pemberdayaan masyarakat sesuai Renja tahun 2023 dapat diakomodir pada APBD tahun 2023 nantinya.`

#### **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila diisesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut seperti tercantum pada Tabel 2.3. Sedangkan pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.4.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- c. Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Urusan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas tiga indikator:

1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.
2. Persentase pengentasan desa tertinggal.
3. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Pada Tahun 2021, indikator kinerja ini tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Tahun 2021 merupakan kondisi awal dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2021-2026. Realisasi pada Tahun 2021 ini menjadi dasar dalam menyusun target perencanaan 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2026). Sarana Prasarana perkantoran Pemerintahan Desa/Nagari, sudah 80% dalam kondisi baik. Upaya pengentasan Desa tertinggal pada 2 Nagari yaitu Nagari Koto Lamo dan Nagari Galugua. Sedangkan Nagari Mandiri hingga tahun 2021, sudah 5 Nagari yaitu Nagari Taram, Nagari Sarilamak, Nagari Situjuh Batur, Nagari Guguak VIII Koto, Muaro Paiti.

Tabel 2.3 (Tabel T.C. 30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari  
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		√	80%	81%	82%	84%	80%	81%	82%	84%	Tercapai
2	Persentase pengentasan desa tertinggal		√	2,5%	2.5%	1.25%	1.25%	2,5%	2.5%	1.25%	1.25%	Tercapai
3	Persentase peningkatan status desa mandiri		√	5%	5%	8%	10%	5%	5%	8%	10%	Tercapai

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran	Indikator	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	IDM	0,7404	0.7562	0.772	0.7878	0,7404	0.7562	0.772	0.7878	Tercapai
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	50%	55%	60%	60%	50%	55%	60%	60%	Tercapai
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65.85	66	67	68	65.85	66	67	68	Tercapai
		Nilai IRB	25.91	27	28	29	25.91	27	28	29	Tercapai
		Nilai IKM	82,81	84	85	86	82.81	84	85	86	Tercapai

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DPMD/N terdiri atas tiga (3) sasaran yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dan Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dengan indikator yaitu: IDM (Indeks Desa Membangun). Sedangkan meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator persentase peningkatan kapasitas Lembaga Adat. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP, Nilai IRB dan Nilai IKM. Nilai AKIP Berdasarkan Evaluasi Inspektorat, Nilai IRB Berdasarkan Evaluasi Inspektorat, dan Nilai IKM Berdasarkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Oleh OPD. Pada Tahun 2021, Kepala DPMD/N telah mencapai target IKU yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah 2021-2026.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N**

Dengan adanya Program Kegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
4. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
5. Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaran tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memadai.
2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

3. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan Kelembagaan di Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
4. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas DPMD/N ini akan berdampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah dan menghadapi isu strategis nasional. Isu strategis nasional yang terkait pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah upaya percepatan penanganan stunting. Sedangkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih periode tahun 2021-2026, terkait dengan misi satu (1) dan tiga (3). Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan**. Misi tiga (3) adalah **Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah**. Program/ kegiatan/ subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2023 adalah program-program yang dapat mengatasi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMD/N. Serta program yang dapat mendorong percepatan pencapaian target kinerja sesuai visi misi kepala daerah dan isu strategis nasional.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, agar tidak terjadi pemotongan anggaran Program/Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan disarankan atau diharapkan untuk mendukung pelaksanaan ke lapangan didukung oleh personil yang memadai sesuai dengan bidang teknis yang dibutuhkan.
3. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada DPMN hendaknya didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik dan lancar peninjauan lapangan terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan koordinasi di tingkat Kecamatan dan Nagari.

2. Adanya/terselenggaranya forum komunikasi dalam bentuk rapat-rapat dalam memberikan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ada dengan cara pendekatan dan koordinasi sehingga peran serta instansi vertikal dapat memberikan masukan yang berarti bagi DPMD/N Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan maupun di Nagari-nagari.
3. Motor penggerak program/kegiatan Kecamatan dan Nagari-nagari di kabupaten dan Motivator bagi pelaksanaan prosedur ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kewenangan.
4. Dana yang tersedia.
5. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur DPMD/N.
2. Sarana dan Prasarana DPMD/N belum memadai.
3. Keterbatasan Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan.
4. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat.
5. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari.
6. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna.
7. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.
8. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
9. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
10. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
11. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap rancangan RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja DPMD/N dengan berbagai rumusan



yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Pada Akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun hasil perbandingan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja DPMD/N terlihat bahwa ada penambahan 3 sub kegiatan yang merupakan sub kegiatan pendukung PKK (2 sub kegiatan) dan 1 sub kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan PKK merupakan amanat Perpres Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 tahun 2020. Sedangkan penambahan nomenklatur sub kegiatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Hasil telaahan terhadap rancangan RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja DPMD/N disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 (Tabel T.C.31)

**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	6,410,743	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,954,953.65	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	181,262	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	155,508.80	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	32,767.40	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	13,817	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	36,462.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13,357	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10,606.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,887	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,092.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12,880	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10,358.00	
6	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43,311	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43,265.40	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	21,010	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD/N	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13,958.00	
I.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3,450,790.41</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>2,830,694.75</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3,359,950	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD/N	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	2,740,902.55	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	20,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	30,240.00	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	15,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3000 Dokumen	10,452.00	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	11,495	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	10,632.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,220	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10,040.70	
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	12,540	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	6,204.00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	8,085	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Dokumen	16,115.50	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD/N	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12,500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMD/N	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6,108.00	
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>37,000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33,209.50</b>	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4,190.50	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	6,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4,200.00	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	11,284.90	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13,534.10	
1. 4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>194,990</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>218,967.50</b>	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD/N	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	8,500	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMD/N	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	6,500.00	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD/N	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	25,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMD/N	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	55 Paket	25,000.00	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	16,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	13,645.40	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	12,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMD/N	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	13,412.50	
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD/N	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen	10,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMD/N	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	29 Dokumen	13,097.60	
6	Pemindahan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 Orang	10,000	Pemindahan Tugas ASN	DPMD/N	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	2 Orang	7,200.00	
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD/N	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22,500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD/N	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40,200.00	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55,440	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55,908.00	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	35,550	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMD/N	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	44,004.00	
1. 5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>604,500</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>423,454.10</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3,478.00	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	14,003.00	
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	16,500	Penyediaan peralatan rumah tangga	DPMD/N	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	13,000.00	
4	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	26,000	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMD/N	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	25,334.10	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	35,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMD/N	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	14,673.50	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	4,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD/N	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	4,380.00	
7	Penyediaan Bahan/Material	DPMD/N	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	3,000	Penyediaan Bahan/Material	DPMD/N	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	-	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD/N	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	31,100.00	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	450,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	301,513.00	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,628.50	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	15,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD/N	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	10,344.00	
1.6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>1,199,200</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>764,301.00</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	450,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	300,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	541,226.00	
3	Pengadaan Mebel	DPMD/N	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	85,000	Pengadaan Mebel	DPMD/N	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	66,250.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	160,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	156,825.00	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	35,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	99,200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
1. 7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>312,000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>82,586.00</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	6,000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,210.00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	56,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	39,600.00	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,376.00	
4	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	225,000	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	DPMD/N	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	38,400.00	
1. 8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>431,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMD/N</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD</b>	<b>100%</b>	<b>446,232.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	150,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	7,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD/N	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	224,582.00	
3	Pemeliharaan Mebel	DPMD/N	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	12,000	Pemeliharaan Mebel	DPMD/N	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit	-	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	17,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD/N	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23,250.00	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	25,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	124,000.00	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	160,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	37,200.00	
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	60,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMD/N	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	37,200.00	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>7,543,500</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>4,715,372.90</b>	
II	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa</b>	<b>5%</b>	<b>300,000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa</b>	<b>7,5%</b>	<b>227,847.40</b>	
2. 1	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>5%</b>	<b>300,000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa</b>	<b>7,5%</b>	<b>227,847.40</b>	
1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Nagari	300,000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	2 Nagari	227,847.40	
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa</b>	<b>56,96%</b>	<b>485,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Kab. Lima Puluh Kota	<b>Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa</b>	<b>82,27%</b>	<b>485,000.00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	90 Nagari	485,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	130 Nagari	485,000.00	
1	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	45 Dokumen	170,000	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	65 Dokumen	-	
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	45 Dokumen	165,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	65 Dokumen	-	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	150,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	-	
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	2,728,500	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%	2,174,642.00	
4. 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	61%	2,728,500	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	63%	2,174,642.00	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20 Dokumen	180,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	20 Dokumen	-	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	79 Dokumen	135,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	79 Dokumen	174,215.00	
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	79 Dokumen	295,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	79 Dokumen	152,437.00	
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	79 Orang	325,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	79 Orang	124,865.90	
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	79 Laporan	160,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	79 Laporan	291,071.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota					Kota				
6	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	60,000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	65,852.80	
7	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68 Dokumen	220,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68 Dokumen	60,000.00	
8	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	-	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	68,600.00	
9	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	60,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4 Laporan	-	
10	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Profil Desa	79 Dokumen	175,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Profil Desa	79 Dokumen	60,000.00	
11	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	120,000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	147,160.00	
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	79 Dokumen	95,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	79 Dokumen	-	
13	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	160 orang	200,000	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	160 orang	125,154.80	
14	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	20 Desa/Nagari	475,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	21 Desa/Nagari	200,000.00	
15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	79 Laporan	93,500	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	79 Laporan	425,430.70	
16	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	135,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	144,854.80	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	60%	4,030,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	65%	135,000.00	
5.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	60%	4,030,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	65%	1,827,883.50	
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	140,000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1,827,883.50	
2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen (PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	900,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen (PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	36,367.40	
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	900,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	99,408.40	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 Unit	160,000.00	
5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	35 Dokumen	80,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	35 Dokumen	-	
6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9 Laporan	210,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9 Laporan	135,000.00	
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	300,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	198,002.00	
8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1,500,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	899,105.70	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	150,000.00	Permendagri No. 27 Tahun 2021, No. 36 tahun 2020
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	150 Keluarga	150,000.00	Permendagri No. 27 Tahun 2021, No. 36 tahun 2020
					13,954,243					9,670,326.55	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMDN Tahun 2021-2026. Kemudian juga mengakomodir usulan pada Nagari dan Kecamatan pada Musrenbang Nagari, Kecamatan dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dan Renja DPMD/N Tahun 2023 juga mengakomodir Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2023 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan pemangku kepentingan/masyarakat. Jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD/N, usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan selaras dengan isu-isu yang dikemukakan pada sub bagian 2.3 yang salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

**Tabel 2.6 (Tabel T.C.32)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Bimbingan Teknis bagi Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BumNag)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/pengurus BumNag yang mengikuti Bimtek	158 OH	-
2.	Bimbingan Teknis Kader Posyandu	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/kader Posyandu yang mengikuti Bimtek	237 OH	-
3.	Bimbingan Teknis Kader Pembangunan Manusia	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/kader pembangunan manusia yang mengikuti Bimtek	285 OH	-

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4.	Bimbingan Teknis Pengurus RDS	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/pengurus RDS yang mengikuti Bimtek	237 OH	-
5.	Bimbingan Teknis Penyusunan Profil	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/aparatur yang mengikuti Bimtek	158 OH	
6.	Bimbingan Teknis Pengurus Posyantek	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah orang/pengurus Posyantek yang mengikuti Bimtek	140 OH	-

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota**

#### **3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2023 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow* program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
3. Memangkas Program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4 program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas Kementerian Desa:

1. Prukades.

Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.

Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa.

3. BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.

4. Sorga Desa

Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

### 3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat tersebut.

### 3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu dan mempedomani RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Karena RKPD 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026, maka dalam penyusunan RKPD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan telah dilantiknya Bupati terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mengacu kepada Visi dan Misi Bupati terpilih tersebut yaitu:

**Visi : “Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**

**Misi :**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan.
2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang Memiliki Keunggulan di Tingkat Lokal dan Regional.
3. Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Berkelanjutan.



Dari 5 misi ini yang menjadi kewenangan DPMDN untuk mencapainya adalah misi 3 (tiga) dan misi 1 (satu). Pada misi satu dengan prioritas pembangunannya adalah peningkatan peran limbago adat. Pada misi tiga, yang menjadi prioritas pembangunannya adalah pembangunan kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh. Untuk mencapai misi dan melaksanakan prioritas pembangunan ini, program unggulannya adalah:

1. Peningkatan alokasi dana nagari sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada.
2. Pemberian hibah untuk peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada di nagari.
3. Peningkatan kesejahteraan perangkat nagari dan lembaga adat nagari lainnya.
4. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah nagari sebagai ujung tombak pelayanan publik.
5. Pengembangan perekonomian nagari dengan pendampingan dan pemberdayaan serta optimalisasi pasar nagari.
6. Optimalisasi peran BUMNag dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Nagari.
8. Memberikan reward kepada nagari berprestasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N**

#### **3.2.1 Telaahan terhadap Renstra DPMDN Tahun 2021-2026**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021-2026. Dalam penyusunannya merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis DPMD/N (Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, maka dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Propinsi, dan mengacu pada RPJMD propinsi untuk keselarasan

program dan kegiatan pembangunan daerah propinsi dengan pembangunan nasional.

- b. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Propinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/kota dengan pembangunan daerah propinsi.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini mengacu pada kebijakan Nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023 dan Kebijakan Propinsi dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2023. Sedangkan untuk telaahan Renstra, dilakukan terhadap Renstra DPMD/N tahun 2021-2026, terutama dengan memperhatikan target-target yang belum dicapai pada periode Renstra yang sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2021 Tentang Renstra DPMD/N) Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan Misi ke-3 dan Misi ke-1.

### **3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2023**

Selain merupakan penjabaran Renstra DPM, maka Renja DPMD/N tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, maka berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nagari.
4. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan

sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan lomba-lomba pembangunan sosial ekonomi nagari.
6. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
7. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di Nagari.

Berdasarkan permasalahan di atas maka DPMD/N menetapkan tujuan dan sasaran Renja DPMD/N Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan Desa/Nagari.
2. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan/Nagari.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari.
4. Meningkatkan Kegiatan Lomba-lomba dalam rangka memacu Pembangunan Sosial Ekonomi di Nagari.
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari dan lembaga lainnya di Nagari.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2023 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021.

Program dan kegiatan DPMD/N pada tahun 2023 yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin (Program Penunjang) dan Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah sub kegiatan yang akan mendorong meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya reformasi birokrasi di DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan DPMD/N Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Penyediaan bahan logistik kantor 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk mencapai target kinerja DPMD/N sesuai dengan rumusan Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N tahun 2021-2026, maka program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 terdiri dari 4 program yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Program Administrasi Pemerintahan Desa merupakan salah satu Program Unggulan untuk mencapai visi dan Misi Kepala Daerah 2021-2026. Program-program lainnya adalah program pendukung pencapaian misi pertama dan ketiga Kepala Daerah tahun 2021-2026. Misi pertama dan ketiga secara berurutan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan dan Meningkatkan Potensi Nagari Dalam Pembangunan Daerah.

**Tabel 3.2**

**Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENATAAN DESA	1 Penyelenggaraan Penataan Desa	1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 4 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 7 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 8 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 10 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	11 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 12 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 13 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 14 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 15 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan  1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 4 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 6 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 7 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 8 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Berdasarkan Tabel diatas dapat direkapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2023 seperti pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMD/N Tahun 2023**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8	32
4 Program urusan pemberdayaan masyarakat	4	25
	<b>12</b>	<b>57</b>

Dalam pencapaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat, masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Pada tahun 2021, indikator kinerja telah tercapai sesuai target. Namun masih terdapat beberapa aspek dalam upaya pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri yang masih belum terlaksana.

Identifikasi permasalahan dan faktor penentu keberhasilan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Kab. Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2021)**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari</li> </ul>
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari</li> <li>• Sarana Prasarana Nagari yang baik</li> </ul>
	Persentase peningkatan status desa mandiri	Sesuai	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat partisipasi Masyarakat yang baik dalam Pembangunan Nagari</li> <li>• Sarana Prasarana Nagari yang baik</li> </ul>

Pada tahun 2021, indikator kinerja dapat dicapai sesuai target. Faktor-faktor penentu keberhasilan diantaranya adalah tingkat partisipasi Masyarakat yang cukup baik dalam Pembangunan Nagari dan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari yang baik. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator kinerja DPMD/N adalah :

1. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat.

2. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa/nagari.
3. Kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna.
4. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.
5. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
6. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
7. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
8. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar dalam penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023 untuk mencapai indikator dan target kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat, sekaligus sebagai program unggulan dalam mencapai indikator kinerja utama Kepala Daerah. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMD/N Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dituangkan pada Tabel 3.5.



**Tabel 3.5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Nama: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari**

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMDN	100%	3,459,535,047	DAU	Rutin OPD	100%	6,498,569,818
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	DPMDN	85%	133,079,300	DAU	Rutin OPD	85%	208,107,344
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMDN	3 Dokumen	62,842,400	DAU	Rutin OPD	3 Dokumen	75,000,000
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMDN	1 Dokumen	8,735,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	15,889,838
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMDN	1 Dokumen	6,925,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	15,360,838
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMDN	1 Dokumen	5,665,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	13,075,260
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMDN	1 Dokumen	9,865,000	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	14,812,000
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMDN	5 Laporan	29,111,900	DAU	Rutin OPD	5 Laporan	49,807,995

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMDN	4 Laporan	9,935,000	DAU	Rutin OPD	4 Laporan	24,161,414
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi keuangan</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>2,523,233,247.00</b>			<b>100%</b>	<b>3,975,362,474</b>
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPMDN	28 Orang	2,457,855,047	DAU	Rutin OPD	29 Orang	3,863,942,974
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMDN	2 Dokumen	30,240,000	DAU	Rutin OPD	2 Dokumen	25,000,000
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMDN	3000 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	3000 Dokumen	20,000,000
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMDN	12 Dokumen	10,632,000	DAU	Rutin OPD	12 Dokumen	12,644,500
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMDN	1 Laporan	10,040,700	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	14,025,000
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPMDN	5 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	5 Dokumen	15,048,000
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMDN	14 Laporan	14,465,500	DAU	Rutin OPD	13 Dokumen	9,702,000
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPMDN	1 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	15,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.13.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi barang milik daerah</b>		<b>100%</b>	<b>15,484,900</b>			<b>100%</b>	<b>47,500,000</b>
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	2 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	2 Dokumen	15,000,000
2.13.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	DPMDN	1 Laporan	4,200,000	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	6,500,000
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	2 Laporan	11,284,900	DAU	Rutin OPD	2 Laporan	17,500,000
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMDN	1 Laporan	-	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	8,500,000
<b>2.13.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>46,828,000</b>			<b>100%</b>	<b>200,600,000</b>
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	DPMDN	1 Unit	6,500,000	DAU	Rutin OPD	1 Unit	9,500,000
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DPMDN	50 Paket	25,000,000	DAU	Rutin OPD	55 Paket	27,000,000
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMDN	48 Dokumen	10,912,000	DAU	Rutin OPD	50 Dokumen	17,000,000
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DPMDN	1 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	14,000,000
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	DPMDN	28 Dokumen	4,416,000	DAU	Rutin OPD	29 Dokumen	10,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	DPMDN	2 Orang	-	DAU	Rutin OPD	2 Orang	-
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMDN	5 Orang	-	DAU	Rutin OPD	5 Orang	25,000,000
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	5 Orang	-	DAU	Rutin OPD	5 Orang	55,440,000
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	DPMDN	5 Orang	-	DAU	Rutin OPD	5 Orang	42,660,000
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>153,956,100</b>			<b>100%</b>	<b>786,000,000</b>
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPMDN	6 Paket	3,478,000	DAU	Rutin OPD	6 Paket	75,000,000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPMDN	5 Paket	-	DAU	Rutin OPD	5 Paket	6,500,000
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPMDN	3 Paket	-	DAU	Rutin OPD	3 Paket	17,500,000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DPMDN	6 Paket	22,113,600	DAU	Rutin OPD	6 Paket	30,000,000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPMDN	8 Paket	14,673,500	DAU	Rutin OPD	8 Paket	35,000,000
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMDN	180 Dokumen	4,380,000	DAU	Rutin OPD	180 Dokumen	4,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	10 Paket	-	DAU	Rutin OPD	10 Paket	-
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMDN	12 Laporan	8,100,000	DAU	Rutin OPD	12 Laporan	35,000,000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMDN	150 Laporan	101,211,000	DAU	Rutin OPD	150 Laporan	550,000,000
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMDN	1 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	1 Dokumen	16,000,000
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	12 Dokumen	-	DAU	Rutin OPD	12 Dokumen	17,000,000
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan</b>		<b>100%</b>	<b>301,912,500</b>			<b>100%</b>	<b>635,000,000</b>
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	-
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DPMDN	4 Unit	252,837,500	DAU	Rutin OPD	2 Unit	350,000,000
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPMDN	20 Unit	-	DAU	Rutin OPD	25 Unit	100,000,000
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPMDN	10 Unit	49,075,000	DAU	Rutin OPD	10 Unit	185,000,000
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMDN	2 Unit	-	DAU	Rutin OPD	2 Unit	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	-
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	-
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100%</b>	<b>101,586,000</b>			<b>100%</b>	<b>345,000,000</b>
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	DPMDN	2 Laporan	1,210,000	DAU	Rutin OPD	4 Laporan	3,000,000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	DPMDN	36 Laporan	39,600,000	DAU	Rutin OPD	36 Laporan	65,000,000
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	DPMDN	1 Laporan	1,376,000	DAU	Rutin OPD	1 Laporan	27,000,000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	DPMDN	36 Laporan	59,400,000	DAU	Rutin OPD	36 Laporan	250,000,000
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD</b>		<b>100%</b>	<b>183,455,000</b>			<b>100%</b>	<b>301,000,000</b>
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DPMDN	19 Unit	-	DAU	Rutin OPD	19 Unit	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	-	5 Unit	167,505,000	DAU	Rutin OPD	5 Unit	8,000,000
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	DPMDN	125 Unit	-	DAU	Rutin OPD	125 Unit	-
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/kantor lainnya	DPMDN	30 Unit	15,950,000	DAU	Rutin OPD	30 Unit	18,000,000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	35,000,000
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	170,000,000
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	DPMDN	1 Unit	-	DAU	Rutin OPD	1 Unit	70,000,000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,397,752,750				8,112,000,000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	5%	210,000,000			7,5%	300,000,000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	5%	210,000,000			7,5%	300,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	2 Nagari	210,000,000	DAU	Prioritas OPD	2 Nagari	300,000,000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	56,96%	127,636,000	DAU		82,27%	175,000,000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	90 Nagari	127,636,000			130 Nagari	175,000,000
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	45 Dokumen	-	DAU	Prioritas OPD	65 Dokumen	-
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	45 Dokumen	-	DAU	Prioritas OPD	65 Dokumen	-
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	127,636,000	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	175,000,000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kabupaten Lima Puluh Kota	100%	2,258,172,650	DAU		100%	2,672,000,000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	61%	2,258,172,650	DAU	IKU OPD	63%	2,672,000,000



Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Dokumen	126,000,000	DAU	Prioritas OPD	20 Dokumen	190,000,000
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Dokumen	152,437,000	DAU	Prioritas OPD	79 Dokumen	145,000,000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Dokumen	259,891,900	DAU	Prioritas OPD	79 Dokumen	95,000,000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Orang	227,491,000	DAU	Prioritas OPD	79 Orang	385,000,000
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Laporan	111,997,800	DAU	Prioritas OPD	79 Laporan	170,000,000
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	42,000,000	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	80,000,000
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	68 Dokumen	177,095,800	DAU	Prioritas OPD	68 Dokumen	240,000,000
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-		Prioritas OPD	1 Laporan	-
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	4 Laporan	42,000,000	DAU	Prioritas OPD	4 Laporan	80,000,000

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Dokumen	133,000,000	DAU	Prioritas OPD	79 Dokumen	120,000,000
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	84,003,000	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	132,000,000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Dokumen	126,114,600	DAU	Prioritas OPD	79 Dokumen	10,000,000
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Lima Puluh Kota	160 orang	140,000,000	DAU	Prioritas OPD	160 orang	240,000,000
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Desa/Nagari	361,000,000	DAU	Prioritas OPD	21 Desa/Nagari	485,000,000
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	79 Laporan	140,141,550	DAU	Prioritas OPD	79 Laporan	150,000,000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	135,000,000	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	150,000,000
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat</b>		<b>60%</b>	<b>2,801,944,100</b>			<b>65%</b>	<b>4,965,000,000</b>

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya		60%	2,801,944,100			65%	4,965,000,000
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	100,076,000	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	180,000,000
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Dokumen (PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	668,418,400	DAU	Prioritas OPD	3 Dokumen (PKK, Posyandu, Lembaga Adat)	1,100,000,000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	500,000,000	DAU	Prioritas OPD	3 Lembaga (LPM, KP-SPAMS, KPMD)	1,100,000,000
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Lima Puluh Kota	20 Unit	-	DAU	Prioritas OPD	20 Unit	-

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Anggaran Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	35 Dokumen	-	DAU	Prioritas OPD	35 Dokumen	-
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Lima Puluh Kota	9 Laporan	135,000,000	DAU	Prioritas OPD	9 Laporan	220,000,000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Laporan	198,002,000	DAU	Prioritas OPD	1 Laporan	165,000,000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Dokumen	900,447,700	DAU	Prioritas OPD	1 Dokumen	1,800,000,000
2.13.05.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kabupaten Lima Puluh Kota	150 Keluarga	150,000,000	DAU	Perpres No. 99/2017, Permendagri No. 36/2020	150 Keluarga	200,000,000
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kabupaten Lima Puluh Kota	150 Keluarga	150,000,000	DAU	Perpres No. 99/2017, Permendagri No. 36/2020	150 Keluarga	200,000,000
		<b>Jumlah</b>			<b>8,857,287,797</b>				<b>14,610,569,818</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Renja DPMD/N Tahun 2023 mengacu kepada program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023 dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan program kegiatan yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2023 yaitu sebanyak 5 Program, 12 Kegiatan dan 84 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Rencana Kinerja DPMDN dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Renstra tahun kedua pada Kepala Daerah baru. Penyusunan rencana target kinerja pelayanan perangkat daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu kepada Renstra DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026. Sedangkan untuk target Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rencana Indikator Kinerja Utama**  
**Kepala Daerah Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.772	0.7878	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Target Kinerja IKU DPMDN**

NO	SASARAN	INIDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET		Ket.
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Indeks ABS ABK			
		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	60%	65%	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.772	0.7878	
		Indeks Desa Membangun (IDM)	0.772	0.7878	
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah				
		Nilai AKIP	67	68	
		Nilai IRB	28	29	
		Nilai IKM	85	86	

**Tabel 4.3**  
**Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket.
			2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	82	84	
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	1,25	1.25	
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5	10	

Untuk mencapai target kinerja tersebut, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 pada bab sebelumnya. Sedangkan rekapitulasi rencana kegiatan dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2032 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan**  
**DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Tahun 2023**

No.	Bidang Urusan	Tahun 2023		Tahun 2024	Tahun 2023		Tahun 2024	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	3,459,535,047	6,498,569,818	8	3,459,535,047	6,498,569,818	
2	Urusan Pemberdayaan Masyarakat	4	5,397,752,750	7,405,000,000	4	5,397,752,750	7,405,000,000	
	Total	5	8,857,287,797	13,903,569,818	12	8,857,287,797	13,903,569,818	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Renja ini memuat hal-hal yang terkait dengan hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021-2022, permasalahan serta rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Program/ kegiatan/ sub kegiatan yang disusun pada Renja Tahun 2023, adalah program-program yang akan mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan serta mendorong pencapaian target kinerja, maka diperlukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan diantaranya adalah seluruh sumber daya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DPMDN Tahun 2023. Selanjutnya untuk menjamin konsistensi, sinergitas, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan Renja, maka diperlukan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023 yang akan dilaporkan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 disusun, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 sehingga dapat mencapai target kinerja DPMD/N yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di                   :   Payakumbuh  
Pada Tanggal                   :       Agustus 2022

**KEPALA DPMD/N**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**ENDRA AMZAR, SH**  
NIP. 19680906 199603 1 001





# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

---

## **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 391 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya.
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja), mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KETIGA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

**KEEMPAT**

: Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan

pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

**KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan 2022 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 391 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 Desember 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum	Anggota
	Kabag Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Pelaporan	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kasubag Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kasubag Kelembagaan Dan Anjab	Anggota
	Kasubag Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Anggota
	Kasubag Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasubag Pimpinan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Pengendalian Program	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Pembinaan BUMD Dan BLUD	Anggota
	Kasubag Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sumber Daya Alam	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum	Anggota
	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Anggota
	Kasubag Bina Mental Dan Spiritual	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Administrasi Pemerintahan Dan Kewilayahan	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuanagn	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilens, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Kasi Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Kasi Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Kasi Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Kasi Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPSTP	Ketua
	Sekretaris DPMPSTP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPSTP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kesehatan Koperasi	
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Kasi Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Anggota
	Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Aplikasi	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Kasi Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kasi Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Kasi Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Kasi Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Kasi Sumber Daya Genetik	Anggota
	Kasi Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Pengembangan Prasarana	Anggota
	Kasi Irigasi	Anggota
	Kasi Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Kasi Perlindungan Tanaman	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Kasi Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distrikhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Evaluasi Pendapatan Daerah	
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Kasubid HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**